

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam mendukung otonomi daerahnya masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dari tingkat rasio kemandirian, bahwa pola hubungan keuangan Pemerintah Provinsi NTT selama Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018 tergolong rendah dimana peran pemerintah pusat masih sangat dominan. Namun begitu, Pemerintah Provinsi NTT cukup efektif dan efisien dalam mengelola pendapatan asli daerahnya.
2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif menunjukkan bahwa aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta kinerja pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik.
3. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,137 dengan nilai t sebesar 0,999. Nilai t tersebut lebih kecil dari t tabel (1,662) atau P Values 0,318. Hasil ini berarti bahwa perencanaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, ditolak.
4. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pengaruh pelaksanaan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.819 dengan nilai t sebesar 11,829 atau P Values 0,000. Nilai t tersebut lebih besar dari t tabel

(1,662). Hasil ini berarti variabel pelaksanaan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, diterima.

5. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan pengaruh penatausahaan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,141 dengan nilai t sebesar 0,920 atau P Values 0,358. Nilai t tersebut lebih kecil dari t tabel (1,662). Hasil ini berarti bahwa variabel penatausahaan memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, ditolak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada dasarnya tingkat kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah baik, namun belum mencapai nilai ideal, maka perlu peningkatan kinerja yang efektif dengan disertai pengawasan intern dan pengelolaan yang baik.
2. Peningkatan pemahaman dan penggunaan sistem informasi akuntansi Pemerintah Daerah dalam proses pengelolaan keuangan daerah dan pengembangan sumber daya manusia dalam sistem pengelolaan keuangan daerah di setiap organisasi perangkat daerah sehingga tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Penelitian ini masih terbatas, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian terkait kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan menambahkan variabel-variabel independen lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini antara lain pelaporan dan pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Prabu Mnagkunegara. 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Refika Aditama: Jakarta
- Akbar P.S dan Usman. 2008. *Pengantar Statistika*. Bumi Aksara: Jakarta
- Andrei, Shleifer. 2004. "Does Competition Destroy Ethical Behavior, *American Economic Review*", *Americans Economic Association*, Vol 94 (2), pp 414-418
- Anggraini, 2014. *Kompetensi SDM terhadap Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah*
- Arifiandi, Anton, 2009. *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobongan Dilihat dari Pendapatan Daerah Terhadap APBD Tahun 2005-2007*
- Agustina.A Oesi, 2013. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)*. Tesis, Malang, Universitas Brawijaya,
- Baridwan, Z. 1991. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE
- Baldric Siregar. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Fokus Media, Bandung
- Cole W Gerald. 2002. *Sistem Akuntansi (Penyusunan Prosedur dan Metode)* Edisi Kelima, cetakan kedelapan. Penerbit BPFE Universitas Gaja Mada Yogyakarta
- Choirul, Saleh. 2013. *Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur*, Malang UB Press Program Pascasarjana Universitas Brawijaya
- Devas. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI Press Jakarta
- Damayanti dan Halim. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta STIE: YKPN
- Ellen. 2014. *Anggaran Perusahaan, Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Erlina Rasdianto, 2013, *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Penerbit Brama Ardian. Jakarta
- Ferdinand, Augusty. 2014. *Structural Equation Modelling dalam Penelitian Manajemen*. Semarang : FE UNDIP

- _____. 2014.a. *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2014. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi Kelima*, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam 2006 *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*, Semarang: Badan Penerbit Uniiversitas Diponegoro
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP UMP YKPN
- _____. 2007. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah : Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah Yogyakarta*. Yogyakarta: UPP UMP YKPN
- _____. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- J, Augusto. 2014, “*Governance Mechanisms and Performance of Publycly Traded Companies*” International Journal of Business and Management Vol. 9, No. 12; 2014: Lisboa Portgal, ISEG–School of Economics and Management
- Muhammad Syam Kusufi.2012, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Empat, Jakarta, SalembaEmpaat
- Mahmudi, 2016, *Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN. Edisi Revisi. UII Press
- Mardiasmo, 1999, *Otonomi Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik National Seminar Promoting Good Governance 1999*
- _____. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit Andi Offet
- Muindro Renyowijoyo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. MitraWacana Media
- Medi, Setianus, 1996, *Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur*, Yogyakarta.
- Nunuy Nur Afiah, 2009, *Akuntansi Pemerintahan : Implementasi Keuangan. Daerah*. Jakarta : Kencana.
- Sedarmayati. 2003. *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*. Pernerbit. Ilham Jaya, Bandung

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabet

_____. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta

_____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Syamsudin dan Damayanti. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*.
Bandung: Angkasa.

Zimmerman, B. J. 2000. *Attaining Self-Regulation : A Social Cognitive Perspective*. New York :
University of New York.

Yuliati, 2001. Jurnal, “*Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Di Kabupaten Malang*”

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*,
Jakarta

_____. *Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta : Dirjen PUOD

_____. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*

_____. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

_____. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta

_____. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*, Jakarta

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*

_____. *Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*.

_____. *Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Ciashevinsia.wordpress.com Conyers & Hills. 1994 *Kosep Perencanaan dan Pembangunan*

Risnisiariakt.wordpress.com Jones & Pendlebury. 1996 *Chartered Institute of Management Accountants*